

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan fenomena dimana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Globalisasi telah membuka isolasi batasan antar negara yang selama ini berlaku untuk hal-hal yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, akibat sedemikian cepat dan akurat informasi mengalir dari satu tempat ke tempat lain.

Adanya desakan dari negara-negara besar bahwa untuk dapat bergaul secara baik di dalam era global, negara yang bersangkutan harus memperhatikan hal-hal seperti demokratisasi, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, maka terlihat secara tidak langsung tuntutan masyarakat terhadap pemerintahannya pun menjadi berubah. Pemerintah diminta untuk lebih responsif terhadap permintaan masyarakatnya, lebih memperbaiki kinerja birokrasi dan administrasi agar mutu pelayanan kepada masyarakat lebih baik dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas, lebih menyadari berbagai perubahan mendasar yang harus dipahami dan dilaksanakan untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain.

Pada saat ini teknologi diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas kehidupan manusia menunjukkan peranannya. Pada dasarnya mayoritas bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan berbagai data, informasi, pengetahuan, maupun kebijakan beserta penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa teknologi yang paling cocok untuk diterapkan adalah teknologi informasi.

Dewasa ini, pemerintah sudah mulai merencanakan sebuah sistem yang sifatnya terpusat, dengan kata lain bahwa segala pembangunan yang dilakukan mengarah pada aturan dari pusat, sehingga nantinya segala bentuk pembangunan yang dilakukan akan terkontrol dengan baik. Pembangunan terpusat memungkinkan banyak elemen pemerintahan dapat saling terkoneksi dengan baik

bahkan saling bertukar data antar elemen yang berkaitan. Saat ini banyak pemerintahan pusat maupun daerah yang mencoba mengembangkan sebuah sistem pengolahan data secara elektronik atau yang disebut dengan *Electronic Government (e-Government)*. *E-Government* pada dasarnya merupakan suatu sarana yang dibangun untuk meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah dalam waktu yang singkat atau pembentukan mekanisme pemerintah yang bersih dan transparan. Maksud sarana tersebut adalah media yang digunakan untuk mentransformasikan penggunaan teknologi informasi menjadi suatu informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Bojongloa Kaler sebagai salah satu kecamatan di Kota Bandung merupakan bagian integral dari pembangunan pemerintahan Kota Bandung. Kegiatan pembangunan tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat dan merupakan suatu proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat dan diberi fasilitas oleh pemerintah. Sejarah Kecamatan Bojongloa Kaler dimulai pada tahun 1969-1989 yang awalnya bernama Kecamatan Bojongloa, yang terdiri dari 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Jamika, Babakan Tarogong, Babakan Asih, Kopo, Sukaasih, Situsaeur dan Kelurahan Kebonlega. Sejak tahun 1989 dipecah menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kecamatan Bojongloa Kidul. Kecamatan Bojongloa Kaler terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu : Kelurahan Jamika, Babakan Tarogong, Babakan Asih, Kopo, Suka Asih sedangkan Kelurahan Situsaeur dan Kebonlega masuk ke Kecamatan Bojongloa Kidul.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler tahun 2009-2013 memiliki visi dan misi untuk kemajuan di wilayahnya. Visi Kecamatan Bojongloa Kaler dalam jangka waktu tahun 2009-2013 adalah terwujudnya Kecamatan Bojongloa Kaler yang partisipatif, berdaya, dan taat untuk memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat.

Untuk merealisasikan harapan dan tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah diterapkan, maka Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler bersama

seluruh elemen masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler harus memahami akan makna dari visi tersebut dengan melakukan misi, yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan peran serta, inisiatif, inovatif, dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.
2. Memberdayakan masyarakat dan lembaga masyarakat di segala bidang.
3. Memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum, dan aturan yang ditetapkan.
4. Memiliki warga yang mampu menjaga keamanan dan akur dengan sesama sehingga tercipta ketentraman di lingkungan masyarakat.

Demi terwujudnya visi dan misi tersebut, Kecamatan Bojongloa Kaler harus memiliki infrastruktur yang memadai bagi masyarakat di wilayahnya. Infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Kecamatan Bojongloa Kaler telah memiliki berbagai infrastuktur fisik seperti infrastuktur pelayanan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, lembaga keuangan, dan kesehatan. Namun demikian, infrastuktur tersebut belum dapat mendukung seluruh aktivitas masyarakat untuk tercapainya harapan masyarakat dan pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler.

Kecamatan Bojongloa Kaler dan lima Kelurahan di bawahnya memiliki peranan yang berbeda dalam pengelolaan infrastruktur di wilayahnya. Peranan Kecamatan sebagai koordinator dan fasilitator, sedangkan Kelurahan berperan untuk melakukan *monitoring*, pendataan, pelaporan, dan pengajuan infrastruktur. Misalnya dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur, RT, RW, Kelurahan, atau tokoh masyarakat mengajukan usulan perbaikan atau pembangunan infrastruktur dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan yang dituangkan dalam format usulan, yang selanjutnya direkap dan diurut prioritasnya. Selanjutnya usulan tersebut dilaporkan ke Kecamatan dalam forum Musrenbang di Kecamatan. Pihak Kecamatan selanjutnya memprioritaskan mana yang ditangani terlebih dahulu. Misalnya untuk sekolah, maka usulan itu ditujukan ke Dinas Pendidikan (Disdik) dan untuk tempat ibadah ke Dinas Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler tahun 2009-2013, Kecamatan Bojongloa Kaler memenuhi potensi infrastuktur yang cukup baik, di antaranya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel I.1 Infrastruktur di Kecamatan Bojongloa Kaler

No.	Bidang/Sektor	Nama Bangunan	Jumlah (buah)
1.	Pendidikan	TK	14
2.	Pendidikan	SD Negeri	4
3.	Pendidikan	SD Swasta	10
4.	Pendidikan	SMP Negeri	2
5.	Pendidikan	SMP Swasta	7
6.	Pendidikan	SMA Negeri	1
7.	Pendidikan	SMA Swasta	5
8.	Pendidikan	SLB Swasta	1
9.	Pendidikan	SMP Terbuka	1
10.	Pendidikan	Madrasah Ibtidaiyah	2
11.	Keagamaan	Masjid	106
12.	Keagamaan	Gereja	12
13.	Keagamaan	Vihara	4
14.	Kesehatan	Puskesmas	2
15.	Kesehatan	Apotek	8
16.	Kesehatan	Posyandu	47
17.	Perekonomian	Bank	8
18.	Perekonomian	Pasar	2
19.	Perekonomian	Hotel	2

Pada tabel I.1, Kecamatan Bojongloa Kaler memiliki banyak infrastruktur berupa bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum yang tersebar di lima kelurahannya. Infrastruktur tersebut memiliki peran yang cukup signifikan, di antaranya berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia yang hidup di wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler.

Kondisi saat ini dengan jumlah penduduk yang terus meningkat di wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler, pihak kecamatan perlu mengelola dan mengontrol ketersediaan infrastruktur dengan baik. Hal ini berkaitan dengan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui perihal infrastruktur yang ada di wilayahnya. Pengelolaan infrastruktur di kecamatan saat ini memang masih menggunakan sistem konvensional dengan *paper-based* dan belum ada media untuk mempublikasikannya ke masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sistem informasi dalam rangka mendukung pengelolaan infrastruktur di Kecamatan Bojongloa Kaler. Bagi Kecamatan Bojongloa Kaler, sistem informasi ini dapat membantu pihaknya dalam membuat sistem pendukung keputusan terkait perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur yang berada di wilayahnya.

I.2 Rumusan Masalah

Pada bagian ini diuraikan rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini di antaranya :

1. Bagaimana membangun sistem informasi yang dapat menyimpan data mengenai infrastruktur yang berada di Kecamatan Bojongloa Kaler ke dalam sistem?
2. Bagaimana membangun sistem informasi yang dapat menyediakan informasi mengenai pengelolaan infrastruktur di Kecamatan Bojongloa Kaler agar informasi tersebut dapat dipublikasikan ke masyarakat?
3. Bagaimana membangun sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data infrastruktur dari Kelurahan yang melakukan *monitoring*, pendataan, dan pelaporan ke Kecamatan sebagai koordinator dan fasilitator untuk memudahkan efisiensi dalam komunikasi?

4. Bagaimana membangun sistem informasi yang dapat melakukan pengajuan infrastruktur, baik pengajuan perbaikan infrastruktur yang sudah ada maupun pembangunan infrastruktur baru yang belum ada di setiap Kelurahan?

I.3 Tujuan

Pada bagian ini diuraikan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Membangun sistem informasi yang dapat menyimpan data mengenai infrastruktur yang berada di Kecamatan Bojongloa Kaler ke dalam sistem, agar data tidak hilang dan dapat didokumentasikan dengan baik.
2. Mewujudkan sistem informasi yang dapat menyediakan informasi mengenai pengelolaan infrastruktur di Kecamatan Bojongloa Kaler, sehingga ada media informasi untuk mempublikasikannya ke masyarakat.
3. Membangun sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data infrastruktur dari Kelurahan yang melakukan *monitoring*, pendataan, pelaporan, dan pengajuan infrastruktur ke Kecamatan sebagai koordinator dan fasilitator.
4. Membangun sistem informasi yang dapat melakukan pengajuan infrastruktur, baik pengajuan perbaikan infrastruktur yang sudah ada maupun pembangunan infrastruktur baru yang belum ada di setiap Kelurahan.

I.4 Manfaat

Pada bagian ini diuraikan manfaat dari penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Data mengenai infrastruktur yang berada di Kecamatan Bojongloa Kaler tersimpan secara rapi dan terorganisir untuk proses pencarian data.
2. Masyarakat dapat mengetahui informasi perihal infrastuktur yang tersedia di Kecamatan Bojongloa Kaler melalui sistem informasi pendukung pengelolaan infrastruktur ini. Informasi yang dipublikasikan di antaranya mengenai agenda, berita, dan galeri kegiatan infrastruktur Kelurahan yang berada di wilayahnya. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui grafik yang menunjukkan jumlah infrastruktur yang berada di setiap Kelurahan

3. Memudahkan pihak Kecamatan Bojongloa Kaler melakukan komunikasi dengan Kelurahan yang berada di wilayahnya terkait *monitoring*, pendataan, pelaporan, dan pengajuan infrastruktur.
4. Memudahkan pihak Kecamatan Bojongloa Kaler dalam mengambil keputusan strategis terkait perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur yang berada di wilayahnya.

I.5 Batasan Masalah

Pada bagian ini diuraikan batasan masalah yang dilakukan sehingga permasalahan yang diangkat tidak melebar. Batasan masalah tersebut antara lain :

1. Infrastruktur dalam penelitian ini hanya infrastruktur yang berupa sarana bangunan, meliputi sarana pendidikan, tempat ibadah, kesehatan, dan perekonomian.
2. Aplikasi atau sistem yang dibuat berbasis *website*.
3. Aplikasi atau sistem dibuat dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan *framework* CodeIgniter dan *database* MySQL.
4. Penelitian ini masuk ke dalam tahapan kerja manajemen aset, yaitu inventarisasi aset secara fisik.
5. Parameter keputusan *approval* pengajuan sarana ditentukan oleh forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan tidak dibahas dalam penelitian ini.